

Tabel 7
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Output	Perkiraan Waktu Tahun ke					Anggaran (Rp) Tahun ke					Leading Sector	Pelaksana
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5					6						
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	● Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)													
		- Pembentukan, pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi rencana kerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi Tim RB	SK Tim RB, kegiatan, laporan monev dan tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Manajemen Perubahan /Inspektorat	Asesor PMPRB, unit kerja
		- Penyusunan road map RB telah disusun dan diformalkan	Peraturan Bupati tentang Road Map RB	✓	-	-	-	-		-	-	-	-	Pokja Manajemen Perubahan /Organisasi	Organisasi
		- Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan dilakukan	Penyebaran informasi terkait RB Kab. Luwu Timur mealui media	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Manajemen Perubahan /Humas	Humas
		● Penguatan nilai integritas													
		- Melaksanakan survey penilaian integritas	Dokumen Survey Penilaian Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Pokja Manajemen Perubahan /Inspektorat	Satuan kerja
		● Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model													
		- Penerbitan SK agen perubahan dan role model disertai tugas dan peran masing-masing	SK agen perubahan dan role model	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Manajemen Perubahan/ Inspektorat	Bagian Hukum
		- Pelaksanaan tugas agen perubahan dan role model	Pelaksanaan kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/	Agen perubahan

														Agen perubahan dan role model	dan role model
		• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 - Bimtek Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah dan pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) - Internalisasi program dan kegiatan KBK dalam sistem manajemen - Monitoring dan Evaluasi Program Kerja KBK	Laporan bimtek Rencana kerja kegiatan KBK dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Persentase monev di OPD	- - -	✓ ✓ -	- ✓ ✓	- ✓ ✓	- ✓ ✓	- - -	90.000.000 90.000.000 -	- 90.000.000 10.000.000	- 90.000.000 10.000.000	- 90.000.000 10.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan/ Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan/ Bagian Organisasi	Perwakilan Satuan kerja Kelompok Budaya Kerja Kelompok Budaya Kerja
		• Penguatan peran Tim Assessor PMPRB	Bimtek penguatan peran	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	27.000.000	29.000.000	32000.000	35.000.000	Pokja Manajemen Perubahan/ Bagian Organisasi	Organisasi
Penataan Peraturan perund-nga n/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (menghilangkan overlapping peraturan) - identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (menghilangkan overlapping peraturan) - Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan	Laporan identifikasi dan pemetaan regulasi Kebijakan pelayanan dan atau perizinan	-	✓ ✓	- ✓	- ✓	✓ ✓						Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan/ Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundangan/	Bagian Hukum Satuan Kerja

		memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi											Deregulasi Kebijakan/ Bagian Organisasi	
		• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi - Revisi peraturan daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat - Digitalisasi produk hukum - Penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan peraturan daerah	Matriks revisi peraturan produk hukum yang didigitalisasi Naskah akademik	- ✓ ✓	✓ ✓ ✓	 ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓						Pokja Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan/ Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan/ Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	Bagian Hukum Bagian Hukum Satuan Kerja
		• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur - Sosialisasi regulasi nasional	Kegiatan sosialisasi	-	✓	✓	✓	✓	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan/ Bagian Hukum	Satuan Kerja
		• Melakukan perencanaan kegiatan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Kegiatan perencanaan kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi	Satuan Kerja

														Kebijakan/ Bappeda	
		● Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Dokumen kajian evaluasi kemanfaatan kebijakan	-	-	✓	-	-	-	-	200.000.000	-	-	Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan/ Balitbangda	Balitbangda
Penataan Organisasi/ Kelemba-gaa n	4. Indeks kelembagaan	● Assessment organisasi berbasis kinerja													
		- Melaksanakan evaluasi kelembagaan	Dokumen evaluasi kelembagaan	-	-	✓	-	-	-	-	75.000.000	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		● Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil asesmen													
		- Penyederhanaan kelembagaan birokrasi	Perbup penyederhanaan kelembagaan	-	-	✓	-	-	-	-	75.000.000	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		● Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi													
		- Penyetaraan jabatan	SK Penyetaraan Jabatan	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Penyederhanaan struktur organisasi	Peraturan Bupati tentang penyederhanaan struktur	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	• Penerapan tata kelola SPBE													
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	- Penyiapan kelengkapan sarana prasarana SPBE, termasuk penguatan dan penambahan jaringan	Ketersediaan sarana prasarana SPBE	-	✓	✓	✓	✓	-	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	- Pemeliharaan sarana prasarana SPBE	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana SPBE	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	8. Indeks Pengelolaan Aset														
	9. Indeks Pemerintahan Daerah	• Penerapan manajemen SPBE													
		- Memiliki Layanan Kepegawaian berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan Kepegawaian berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
		- Memiliki Layanan Kearsipan berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan Kearsipan berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
		- Memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
		- Memiliki Layanan Pubik Berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan Pubik Berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
		• Penerapan layanan SPBE													
		- Menerapkan Layanan Kepegawaian berbasis Elektronik	Penerapan Layanan Kepegawaian berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		- Menerapkan Layanan Kearsipan berbasis Elektronik	Penerapan Layanan Kearsipan berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja

		- Menerapkan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	Penerapan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		- Menerapkan Layanan Pubik Berbasis Elektronik	Penerapan Layanan Pubik Berbasis Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Integrasi pemanfaatan IT	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Satuan Kerja
		• Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital)	Implementasi manajemen kearsipan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Satuan Kerja
		• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Dokumen pencatatan informasi Kegiatan penataan dan penyimpanan arsip	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Satuan Kerja
		- Melakukan pencatatan informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan														
		- Melakukan penataan dan penyimpanan arsip														
		• Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Arsip terdigitalisasi	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Satuan Kerja

		•Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Kegiatan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ BPKAD	Satuan Kerja
		•Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku (pelaksanaan, laporan, dan evaluasi)														
		- Pengadaan aset	Dokumen pengadaan aset oleh OPD	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja
		- Inventarisasi aset	Laporan inventarisasi aset oleh OPD	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ BPKAD	Satuan Kerja
		- Pemeliharaan aset	Dokumen pemeliharaan aset oleh OPD	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	380.000.000	420.000.000	450.000.000	480.000.000	480.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ BPKAD	Satuan Kerja
		- Penyusunan laporan pengelolaan aset	Dokumen pengelolaan aset	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ BPKAD	Satuan Kerja
		- Evaluasi pengelolaan aset	Laporan evaluasi pengelolaan aset	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ BPKAD	BPKAD
		•Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik														
		- Implementasi keterbukaan informasi publi	Media dan informasi publik yang disebar	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		- Evaluasi keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Penataan Tatalaksana/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit														

		- Penyusunan proses bisnis instansi dan unit	Dokumen proses bisnis	-	✓	-	-	-	-	87.000.000	-	-	-	Pokja Penataan Tatalaksana/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		• Penyelarasan proses bisnis dan SOP													
		- Penjabaran peta proses bisnis kedalam SOP	Dokumen SOP	-	✓	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	Pokja Penataan Tatalaksana/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan Unit Kerja
		- Penerapan SOP	Pencetakan SOP dalam berbagai media dan ditempatkan di beberapa titik strategis	-	✓	✓	✓	✓	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Pokja Penataan Tatalaksana/ Bagian Organisasi	Bagian Humas
		- Evaluasi proses bisnis dan SOP	Laporan hasil evaluasi proses bisnis dan SOP	-	-	-	✓	-	-	-	-	50.000.000	-	Pokja Penataan Tatalaksana/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN	• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional													
		- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Dokumen perencanaan kebutuhan pegawai (analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan)	✓	✓	-	-	-						Pokja Sistem Manajemen SDM/ Organisasi	Organisasi
		- Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Pelaksanaan penerimaan pegawai	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM
		- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen rencana, pelaksanaan, monitoring dan	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM

			evaluasi hasil pengembangan pegawai												
	11. Indeks Merit System	● Implementasi manajemen ASN berbasis merit system													
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	- Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka	-	✓	-	✓	-						Pokja Sistem Manajemen SDM/BKPSDM	BKPSDM
		- Melaksanakan mutasi dan pengembangan karir pegawai dengan mempertimbangkan hasil assessment	Pelaksanaan mutasi dan pengembangan karir pegawai melalui pertimbangan hasil assessment											Pokja Sistem Manajemen SDM/BKPSDM	BKPSDM
		● Penetapan ukuran kinerja individu													
		- Ukuran kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja	Kesesuaian kinerja individu dengan IKU unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	Pokja Sistem Manajemen SDM/ Bappeda	Satuan Kerja
		● Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Persentase pegawai yang dimonitoring dan dievaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM/ Bappeda	Bappeda
		● Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja													
		- Penyusunan Kajian Evaluasi Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan	Dokumen Evaluasi Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan	-	-	✓	-	-	-	-	80.000.000	-	-	Pokja Sistem Manajemen SDM/ Balitbangda	Balitbangda
		- Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Tunjangan kinerja berbasis kinerja	-	✓	✓	✓	✓						Pokja Sistem Manajemen SDM/ BPKAD	BPKAD

		- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	Pemberian penghargaan dan sanksi	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Sistem Manajemen SDM/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		● Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi														
		- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	Rencana pengembangan karir			✓	✓	✓	75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM	
		- Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi teknis	Laporan pelaksanaan diklat	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM	
		- Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi manajerial	Laporan pelaksanaan diklat	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM	
		● Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Aplikasi IT dalam manajemen ASN	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	Pokja Sistem Manajemen SDM/ Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
		● Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN														
		- Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai	Lembar pakta integritas pegawai	-	✓	-	-	-							Pokja Sistem Manajemen SDM/ Inspektorat	Inspektorat
- Penyusunan dan penetapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku instansi	Perbup disiplin/kode etik/ kode perilaku instansi	-	✓	-	-	-							Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	Satuan Kerja		
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan	Hasil monitoring dan evaluasi	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	Satuan Kerja		

		disiplin/ kode etik/ kode perilaku instansi - Pemberian sanksi dan imbalan atas penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku instansi	Sanksi dan imbalan	-	-	✓	✓	✓						Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM
		● Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>) - Melaksanakan Bimtek Manajemen Talenta - Pemetaan manajemen talenta	Pelaksanaan Bimtek Hasil pemetaan manajemen talenta	-	✓	-	✓	-	-	90.000.000	-	90.000.000	-	Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM BKPSDM
		● Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Sistem Manajemen SDM/ BKPSDM	BKPSDM
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	● Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>colaborative and crosscutting</i>) - Penyusunan dan penetapan Renstra ● Penyusunan dan penetapan kinerja ● Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	Hasil penetapan Renstra Hasil penetapan kinerja Pedoman akuntabilitas kinerja	-	✓	-	-	-						Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda Pokja Penguatan	Satuan Kerja Satuan Kerja Inspektorat

														Akuntabilitas/ Bappeda	
		• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda	Satuan Kerja
		• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)	Kegiatan peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit											Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda	Satuan Kerja
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Hasil monitoring dan evaluasi kinerja di seluruh OPD	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Bappeda	Satuan Kerja
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran	Sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran											Pokja Penguatan Akuntabilitas/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		• Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja													
		• Efektifitas dan efisiensi anggaran												Pokja Penguatan Akuntabilitas/ BPKAD	BPKAD dan Satuan Kerja
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi - Menerbitkan peraturan bupati tentang SPIP	Peraturan bupati tentang SPIP	-	✓	-	-	-						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Satuan Kerja

		- Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	Kegiatan informasi dan komunikasi SPI	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Melakukan pemantauan pengendalian intern	Kegiatan pemantauan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Melakukan evaluasi atas penerapan SPI		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Satuan kerja dan Inspektorat
		● Meningkatkan kompetensi APIP	Dokumen penilaian	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)														
		- Pengembangan secara mandiri (<i>self imrovement</i>) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i>	Dokumen pengembangan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i>	Persentase auditor yang mengikuti peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		● Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)														
		- Penyusunan analisis beban kerja APIP	Dokumen ABK	-	✓	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-		Pokja Pengawasan/ BKPSDM	BKPSDM
		● Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Kegiatan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ BKPSDM	Satuan Kerja

		• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Kegiatan pengelolaan barang dan jasa	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, khususnya pada pelayanan yang strategis dan beresiko														
		- Pencanangan Zona Integritas	Kegiatan pencanangan	✓	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Tim Penilai Internal
		- Penetapan unit yang menjadi zona integritas	Unit kerja yang ditetapkan sebagai zona Integritas	✓	-	✓	-	-	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Tim Penilai Internal
		- Pembangunan Zona Integritas	Terbangunnya Zona Integritas	✓	-	✓	-	-	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Tim Penilai Internal
		- Evaluasi Zona Integritas	Laporan evaluasi zona integritas	-	✓	-	✓	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Tim Penilai Internal
		- Penetapan unit kerja yang ditetapkan sebagai “WBK/WBBM”	Unit kerja yang ditetapkan sebagai “WBK/WBBM”	-	-	✓	✓	✓	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000		Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Tim Penilai Internal
		• Penguatan pengendalian gratifikasi														
		- <i>Public Campaign</i> pengendalian gratifikasi secara langsung dan tidak langsung	Media sosialisasi dan promosi, hasil survey	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Penanganan gratifikas telah diimplementasikan	Laporan implementasi penanganan gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat

		- Evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	Hasil evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	Tindak lanjut hasil evaluasi		✓	✓	✓	✓						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		• Penguatan penanganan pengaduan dan complain													
		- Integrasi penanganan pengaduan dan complain dalam SP4N-LAPOR	Kegiatan integrasi penanganan pengaduan dan complain											Pokja Pengawasan/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		• Penguatan efektivitas manajemen resiko													
		- Melakukan identifikasi penilaian resiko atas unit kerja (manajemen resiko)	Daftar identifikasi penilaian resiko tiap unit kerja	-	-	✓	-	-						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Satuan Kerja
		- Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Kegiatan pengendalian resiko			✓	✓	✓						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Satuan Kerja
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan													
		- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN dan LHKASN)	Hasil penyampaian LHKPN dan LHKASN	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/ BPKAD	Seluruh PNS
		- Membuat Peraturan Bupati terkait Penanganan Benturan Kepentingan	Peraturan Bupati	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Membuat SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		- Implementasi penanganan benturan kepentingan	Laporan pelaksanaan penanganan	-	✓	✓	✓	✓						Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat

		- Evaluasi penanganan benturan kepentingan	benturan kepentingan Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
		• <i>Whistle Blowing System</i> (membuat kebijakan, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi) - Pembangunan dan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) - Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) - Mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) - Melakukan evaluasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) - Menindaklanjuti hasil evaluasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Terbangunnya WBS Hasil sosialisasi WBS Hasil implementasi WBS Hasil evaluasi WBS Tindak lanjut hasil evaluasi WBS	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Dinas Kominfo
				-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
				-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
				-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
				-	-	✓	✓	✓							Pokja Pengawasan/ Inspektorat	Inspektorat
layanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) - Melaksanakan bimtek pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Bimtek pelayanan publik	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja

		- Menyusun Standar Pelayanan	Perbup tentang Standar Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Menyusun Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan	✓	✓	-	-	-							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Menyusun pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Hasil reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		- Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Melaksanakan tindak lanjut atas Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil tindak lanjut atas Survey Kepuasan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Mempublikasikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan rencana tindak lanjut perbaikan	Publikasi hasil SKM dan rencana tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		- Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen tindak lanjut laporan hasil SKM	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		- Menyusun system pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar pelayanan	System pemberian kompensasi	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		- Melaksanakan system pemberian kompensasi kepada penerima layanan	Pelaksanaan pemberian kompensasi	-	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja

		bila tidak sesuai standar pelayanan													
		● Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan - Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi pelayanan unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pelayanan Publik/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		● Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik - Menyiapkan media pengaduan dan konsultasi pelayanan - Menyiapkan unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan - Implementasi penanganan pengaduan masyarakat - Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat - Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Media pengaduan dan konsultasi pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pelayanan Publik/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
			Unit Pengelola Pengaduan dan konsultasi pelayanan	-	✓	-	-	-						Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
			Penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
			Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
			Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓						Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja

		- Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Bagian Organisasi	Satuan Kerja
		• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau	Pelayanan publik berbasis elektronik	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Dinas Kominfo	Satuan Kerja
		• Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik														
		- Menghasilkan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Satuan Kerja
		- Mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan	inovasi yang sustainable	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Satuan Kerja
		- Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah	Dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah	-	-	✓	-	-							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Balitbangda
		- Melembagakan inovasi pelayanan publik	Peraturan Bupati tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah	-	✓	-	-	-							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Balitbangda
		• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Pembentukan Mal Pelayanan Publik	-	-	✓	-	-							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda	Balitbangda

		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Laporan monev	✓	✓	✓	✓	✓							Pokja Pelayanan Publik/ Balitbangda/ Organisasi	Satuan Kerja
--	--	---	---------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--------------

(Sumber : Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020, RENSTRA LUWU TIMUR 2018-2021)

